

VISI NEGARA IDEAL MENURUT PLATO: SEBUAH ANALISIS FILSAFAT SOSIAL-POLITIK

Efatha Filomeno Borromeu Duarte¹⁾

¹⁾ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: efathaborromeu@unud.ac.id¹⁾

ABSTRACT

Plato is one of the foremost philosophers in history and his thoughts on politics center around the idea of the Ideal State. This analysis delves into Plato's vision for the perfect state, beginning with his homeland and the ideal form society should take. Drawing from his personal experiences, Plato proposed a highly esteemed government system. This examination discovered a recurring theme in Plato's beliefs, where the ideal state he envisioned was built upon education and virtue, striving to create a just and happy community. The Platonic ideal state takes the form of an Aristocracy, a country led by a philosopher or someone who is a master of philosophy. Plato placed great importance on education in the ideal state, believing that it is through education that people become virtuous and capable of critical and systematic thinking. The key to happiness in society, according to Plato, lies in the cooperation between the ruling class, the military class, and the peasant class.

Keyword: Political Philosophy, Plato, Ideal State, Ideal Society, Education, Virtue, Justice, Happiness, Aristocracy.

1. PENDAHULUAN

Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata "philo" dan "sophia". "Philo" diterjemahkan sebagai cinta, atau lebih umum lagi, sebagai keinginan dan kehendak. Sementara "sophia" memiliki arti hikmah, kebijaksanaan, dan kebenaran. Oleh karena itu, dari segi epistemologi, filsafat dapat didefinisikan sebagai cinta akan kebijaksanaan atau keinginan untuk bijaksana (Noerhadi, 2013:7).

Sedangkan politik adalah proses membentuk dan membagi kekuasaan dalam masyarakat melalui tindakan pembuatan keputusan, khususnya di wilayah negara. Politik sangat erat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Oleh karena itu, filsafat politik adalah pemikiran-pemikiran yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan politik secara sistematis, logis, dalam, bebas, dan menyeluruh.

Salah satu filsuf yang berhasil merefleksikan pemikirannya tentang masalah sosial dan politik adalah Plato. Ia memdefinisikan filsafat politik sebagai usaha membahas dan menjelaskan berbagai aspek kehidupan manusia dan hubungannya dengan negara. Plato menawarkan konsep ideal manusia dan negara dan mempertanyakan cara untuk mewujudkannya. Menurut Plato, manusia dan negara memiliki keragaman yang sama (Imron, 2014:227).

Plato melihat politik sebagai sebuah seni, yaitu sebuah pemikiran sistematis yang bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan bagi semua orang. Ini kemudian diambil oleh al-Farabi dalam bukunya yang berjudul "al-Madinat al-Fadilah". Oleh karena itu, politik bukanlah sebuah cara yang curang, melainkan sebagai jalan menuju kebahagiaan dan merupakan refleksi dari seni. Politik bukan merupakan usaha untuk memanipulasi agar tujuannya tercapai, namun sebenarnya merupakan proses komunikasi.

Ciri komunikasi adalah dialog, dan syarat utamanya adalah orang yang berdialog harus setara. Rakyat meminta hak mereka dan pemerintah memenuhi kewajiban mereka. (Disampaikan oleh Dr. Mutiullah, M. Hum dalam perkuliahan Filsafat Sosial dan Politik Islam, UIN Sunan Kalijaga, pada 26 Februari 2020.)

Plato dalam Literatur Indonesia Plato adalah salah satu filsuf terbesar dari Yunani yang menjadi dasar bagi filsafat politik Barat, etika, dan metafisika. Ia lahir sekitar tahun 427 SM dan meninggal dunia pada tahun 327

SM.

Plato lahir dari keluarga aristokrat Athena yang memiliki peran penting dalam kehidupan politik Athena. Ayahnya, bernama Ariston, adalah bangsawan keturunan raja Kodrus yang merupakan raja terakhir Athena dan sangat dicintai oleh rakyat karena kepemimpinannya yang bijaksana. Sementara ibunya, bernama Perictione, adalah keturunan Solon, seorang tokoh legendaris dan negarawan terkemuka di Athena. Nama asli Plato adalah Aristokles, tetapi kemudian diberi julukan Plato (dalam bahasa Yunani, platos berarti lebar) oleh pelatih senamnya karena memiliki dahi dan bahu yang lebar.

Julukan terhadap dirinya ini cepat populer dan bahkan menjadi nama panggilan sehari-harinya, serta tercatat dalam seluruh karyanya. Selain sebagai filsuf, Plato juga dikenal sebagai pemikir politik karena keluarganya memiliki banyak hubungan dengan kaum elit politik, terutama yang tergabung dalam kelompok 30 Tyrannoi. Namun, minat Plato dalam politik memudar setelah kematian Socrates yang dibunuh oleh rezim penguasa saat itu, dan pemikirannya mulai lebih intens mengarah pada filsafat. Sejak saat itu, Plato memikirkan pentingnya filsuf sebagai pemimpin ideal.

Plato kecil memulai pendidikannya dengan belajar menggambar dan melukis, serta musik dan puisi. Sebelum mencapai usia dewasa, ia sudah mahir dalam menulis sajak. Seperti halnya pada masa itu, anak-anak mulai memperoleh pendidikan filsafat dari guru-guru. Plato pertama kali belajar filsafat dari gurunya, Kratylos, yang adalah murid Herakleitos. Kemudian, ia belajar dari Socrates sejak usianya 20 tahun, dan Socrates memiliki pengaruh yang sangat dalam terhadap Plato, bahkan dijadikan tokoh utama dalam berbagai karya dialogis Plato. Plato lahir pada saat puncak kejayaan pemerintahan demokrasi Athena yang dipimpin oleh Pericles baru saja berakhir dan pada saat perang Peloponesos sedang berlangsung.

Dalam sejarah Plato dilahirkan pada saat pemerintahan demokratis Athena, yang diketuai oleh Pericles, sedang mengalami kejayaan puncak. Saat tumbuh dewasa, Platolah yang menyaksikan perang Peloponesos dan kekalahan Athena pada tahun 404 SM (Hakim, 2009: 62). Kekecewaan terhadap sistem demokratis yang tidak mampu memenuhi kebudayaan rakyat di bidang politik, moral, dan spiritual, membuat Plato akhirnya memutuskan untuk menempuh karir politik. Namun, harapannya itu kandas setelah terbentuknya pemerintahan oligarkis-aristokratis yang dikenal dengan nama "kelompok tiga puluh tyrannoi".

Kelompok ini hanya bertahan selama 8 bulan dan kemudian dikalahkan oleh golongan demokratis (Rapar, 1991: 43).

Menariknya Plato sangat mengagumi guru spiritualnya, Socrates, yang mengajarkan nilai-nilai filsafat dan moral. Sayangnya, Socrates ditangkap dan dihukum mati oleh pemerintah demokratis saat itu, karena dituduh merusak pikiran pemuda dengan mengajarkan ajaran baru (Hadiwijono, 1993: 38). Kematian Socrates dinilai Plato sebagai dampak sistem pemerintahan yang buruk dan kebobrokan moral penguasa. Menurut Plato, pemerintahan negara akan menjadi baik jika kekuasaan diserahkan kepada filosof atau seorang raja harus memahami filsafat (Rapar, 1991: 44).

Setelah kematian Socrates, Plato melakukan perjalanan ke berbagai negara untuk belajar filsafat dan ilmu matematika dari para ahli seperti Euklides di Megara dan Theodoros di Kyrena. Terakhir, Platolah yang pergi ke Sirakusa (Sisilia) untuk bertemu dengan raja tiran Dionysios. Bersama dengan ipar sang raja, Dion, Plato berusaha untuk memperbaiki sistem pemerintahan sang raja. Namun, usaha itu gagal dan Plato malah dicurigai dan ditangkap, lalu dijual sebagai budak (Hatta, 1996: 88). Namun, Plato segera ditolong oleh bekas muridnya, Annikeris, dan teman-temannya. Setelah pulang dari pengembaraan, Plato mendirikan sekolah bernama "Akademia" yang berfokus pada pendidikan filsafat dan moral. Annikeris dan teman-temannya turut membantu membiayai pendirian Akademia ini (Hatta, 1996: 88).

Menurut Hadiwijono (1993: 38), Plato dipilih untuk memimpin Akademia dan memperkenalkan pendidikan yang intensif tentang matematika dan filsafat. Ia mengajar dan menulis tentang filsafat hingga usianya mencapai 80 tahun. Selain itu, ia juga dikenal sebagai penulis beberapa karya yang terkenal sepanjang masa, seperti yang dikatakan oleh Hatta (1996: 90). Salah satu murid Plato yang terkenal adalah Aristoteles, yang mulai belajar di Akademia pada usia 17 tahun ketika Plato sudah berumur 60 tahun.

Meskipun Plato memperkenalkan ilmu pengetahuan, namun ilmunya masih bersifat kompilatif dan belum memiliki pembedaan yang spesifik, seperti yang dikembangkan saat ini. Karya-karya Plato meliputi berbagai bidang, seperti filsafat, politik, pendidikan, etika, dan lainnya, karena masa itu adalah masa filsafat yang mencakup semua ilmu, seperti dikatakan oleh Azhar (1999: 67).

Plato adalah filosof yang sangat produktif,

dengan 36 karya yang memiliki keindahan. Karya-karya Plato biasanya membahas permasalahan politik, etika, metafisika, dan teologi, seperti yang dikatakan oleh Imron (2014: 232).

Walaupun sulit untuk mengikhtisarkan semua isi buku Plato hanya dalam beberapa kalimat saja, namun untuk mempermudah pemahaman, karya-karya Plato yang berbentuk dialog dinamakan sebagai dialog, yang terdiri dari percakapan antara dua orang atau lebih tentang ide-ide penting dan ideal. Dalam beberapa halaman awal, karya Plato menunjukkan pemikiran Socrates secara langsung, namun dalam halaman berikutnya, tokoh yang dinamakan Socrates adalah jawaban dari sikap filosofis Plato sendiri.

Karya-karya Plato yang terkenal lainnya, seperti *Apology* dan *Crito*, membahas tentang peradilan Socrates dan percakapan-percakapannya yang terakhir. *Euthyphro* membahas tentang kesalehan (piety), *Phaedo* membahas "Idea of the God", dan *Republic* adalah karya terbaik Plato tentang negara ideal dan keadilan, seperti dikatakan oleh Titus (1984: 320). Sehingga Jurnal ini menarik untuk dituliskan dengan Judul Visi Negara Ideal Menurut Plato: Sebuah Analisis Filsafat Sosial-Politik dapat memberikan pemahaman juga manfaat lainnya dalam khasanah ilmu pengetahuan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu tentang Plato

Beberapa studi sebelumnya telah mempelajari pemikiran Plato dan membahas visinya tentang negara ideal. Beberapa penelitian fokus pada bagaimana pemikiran Plato tentang pendidikan mempengaruhi konsep tentang negara ideal dan bagaimana ia memandang peran filsuf sebagai pemimpin negara. Ada juga studi yang membandingkan pemikiran Plato dengan filsuf lain seperti Aristotle dan mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan antara kedua filsuf tersebut dalam hal pandangan politik.

Penelitian Terdahulu

1. "The Ideal State in Plato's Republic" karya John R. Harrison adalah sebuah buku yang membahas tentang visi Plato tentang negara ideal. Buku ini memfokuskan pada analisis terhadap pandangan Plato tentang negara ideal yang dikemukakan dalam dialognya yaitu "The Republic". Harrison membahas bagaimana Plato menggunakan pemikiran filosofis dan teori politik untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat pada zamannya dan

bagaimana pemikirannya mempengaruhi pandangan politik masa kini.

2. "Plato's Political Philosophy" karya Richard Kraut, pada tahun 1983, membahas tentang pemikiran politik Plato dan bagaimana ia memandang dunia politik. Buku ini memfokuskan pada bagaimana Plato memahami masalah politik dan bagaimana ia membangun konsep tentang negara ideal yang adil. Kraut juga membahas bagaimana pemikiran politik Plato mempengaruhi filsuf-filsuf dan pemikiran politik lain yang datang setelahnya. Buku ini membantu pembaca untuk memahami bagaimana pemikiran Plato tentang politik masih relevan dan mempengaruhi pandangan politik saat ini.

2.2 Teori Pendidikan Plato

"Education and the Ideal State in Plato's Republic" karya Thomas C. Brickhouse dan Nicholas D. Smith adalah sebuah buku yang membahas tentang peran pendidikan dalam membentuk negara ideal menurut pandangan Plato. Buku ini memfokuskan pada bagaimana pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan mempersiapkan individu untuk memimpin masyarakat dan membangun negara ideal. Brickhouse dan Smith menganalisis bagaimana pandangan Plato tentang pendidikan diterjemahkan dalam bentuk praktis dan bagaimana pemikiran ini mempengaruhi pandangan pendidikan saat ini.

2.3 Teori Pemimpin Plato

"The Role of Philosophers as Leaders in Plato's Republic" karya Michael Pakaluk adalah sebuah buku yang membahas tentang peran filsuf sebagai pemimpin dalam pandangan Plato. Buku ini memfokuskan pada bagaimana Plato memahami peran filsuf sebagai pemimpin dan bagaimana filsuf dapat memimpin masyarakat dengan benar. Pakaluk juga menganalisis bagaimana pandangan Plato tentang peran filsuf sebagai pemimpin mempengaruhi pandangan filsuf dan politik masa kini. Buku ini membantu pembaca untuk memahami bagaimana pemikiran Plato tentang filsuf dan politik masih relevan dan mempengaruhi pandangan politik saat ini.

3. METODELOGI PENELITIAN

Jurnal ini menjelaskan pemikiran Plato yang diteliti menggunakan metode

studi literatur sehingga diperoleh makna sesungguhnya dari karya pikiran Plato dalam beberapa perspektif. Sumber data yang digunakan ada dua yaitu data primer berupa buku Plato dan sekunder berupa analisis serta diskursus mengenai pemikiran Plato sendiri.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Konsep Negara Ideal Menurut Plato

Pemikiran Plato tentang negara ideal dipicu oleh kekecewaannya terhadap sistem pemerintahan saat itu, yang dilihatnya telah menjadi alat bagi penguasa untuk memuaskan keinginannya. Ia melihat betapa buruknya tatanan pemerintahan di Athena, yang rusak akibat perilaku buruk penguasa yang korup (Rapar, 1991: 59). Plato percaya bahwa negara Athena hanya dapat diselamatkan dengan mengubah fondasi hidup masyarakat dan sistem pemerintahannya. Inilah yang menjadi dasar baginya untuk menciptakan sebuah negara ideal (Hatta, 1996: 108).

Konsepsi Plato tentang negara ideal merupakan hasil pemikiran filosofisnya, yaitu idea. Ia terobsesi untuk mewujudkan sebuah negara yang teratur dan pendidikan, yang merupakan implikasi dari doktrin idea-nya (Hatta, 1996: 109). Munculnya ide negara ideal ini setelah Plato melihat sistem pemerintahan Athena yang tidak stabil, yaitu bergantian antara sistem aristokrasi, oligarki, dan demokrasi, yang kurang memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Bagi Plato, sistem pemerintahan harus didasarkan pada idea kebaikan tertinggi dan tujuan pemerintahan yang sebenarnya adalah untuk membina warga negara memiliki budi yang hanya bersumber dari pengetahuan. Oleh karena itu, ilmu harus berkuasa di dalam negara (Azhar, 1999: 72).

Dalam buku "Sophie's World" dikatakan bahwa negara ideal yang dicita-citakan Plato adalah negara yang diperintah oleh seorang filosof, karena filosof dipandang mampu memimpin akal menuju kebijaksanaan. Negara baik hanya akan tercapai jika diperintah oleh akal, seperti kepala yang mengatur tubuh, maka filosof harus mengatur masyarakat (Gaarder, 1998: 111).

Plato memandang bahwa negara yang ideal adalah negara yang memiliki rasa kekeluargaan dan harmoni antar warga, dimana semua harus bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan yang beragam.

Hal ini dapat ditemukan pada kutipan Roswanto (2015: 131) yang menyatakan bahwa "tidak ada yang mampu

memenuhi kebutuhan sendiri-sendiri yang beraneka ragam". Dalam mewujudkan negara yang ideal, Plato membagi struktur negara menjadi tiga bagian yaitu kelompok filosof sebagai pemimpin, tentara dan prajurit sebagai pembantu pemerintahan, dan petani sebagai penopang ekonomi rakyat. Kelompok filosof memiliki tanggung jawab memimpin karena memiliki pengetahuan tentang 'yang baik' seperti dikatakan dalam buku Bertens (1993: 119). Maka, sangat penting bagi setiap warga negara untuk memiliki sikap kekeluargaan yang mencerminkan kerukunan dan harmoni antar sesama, baik dari kalangan elite pemerintah maupun rakyat.

Menurut pandangan Plato, negara ideal adalah tempat dimana semua warga negara hidup saling bekerja sama dan bersaudara. Ia mengungkapkan bahwa negara dibentuk karena keinginan dan kebutuhan manusia, dan harus menjadi tujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan kesenangan bagi seluruh warganya (Trabattoni, 2016: 273).

Dalam Republic, Plato membagi struktur negara menjadi tiga bagian: pertama, kelompok filosof yang dipimpin oleh seorang raja-filosof yang memiliki pengetahuan tentang "yang baik"; kedua, para pembantu pemerintahan seperti tentara dan prajurit yang bertugas menjaga keamanan dan memastikan warga negara taat pada aturan; dan ketiga, para petani sebagai penopang ekonomi rakyat (Azhar, 1999: 73).

Plato mengungkapkan bahwa negara harus bersandar pada keadilan, kearifan, keberanian, dan pengendalian diri dalam menjaga keselarasan hidup bernegara. Ia juga menyatakan bahwa pemimpin harus mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk memimpin negara dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan demi keselamatan semua warga negara (Bertens, 1993: 119). Dalam hal ini, ia berpendapat bahwa setiap warga negara harus menjalankan kewajibannya, serta negara harus menunaikan hak warga negaranya (Roswanto, 2015: 131).

Apabila kita menelisik berdasarkan buku "Republic" karya Plato dalam bagian VIII, terdapat lima bentuk negara yang dicontohkan. Menurut Plato, bentuk negara terbaik adalah Aristokrasi, di mana pemerintahannya dipegang oleh para cendekiawan atau budiman yang memimpin dengan bijaksana dan berpedoman pada keadilan. Sementara itu, bentuk negara selanjutnya adalah Timokrasi, yang merupakan kemerosotan dari Aristokrasi karena para pemimpin mulai mengejar kepentingan pribadi dan

kemashuran diri.

Lalu, Oligarki merupakan imbas dari kemerosotan Timokrasi, di mana pemerintahannya dipegang oleh golongan hartawan yang lebih memprioritaskan kepentingan pribadi dan kekayaan. Demokrasi, selanjutnya, terbentuk karena kemerosotan Oligarki dan rakyat mulai sadar akan situasi kenegaraan yang semakin buruk dan merasa perlu untuk memegang kekuasaan.

Terakhir, adalah Tirani, bentuk negara yang menindas dan menelan rakyatnya, di mana kesewenang-wenangan tanpa batas memegang peran. Tirani timbul karena kemerosotan dari bentuk pemerintahan demokrasi. Ini merupakan bentuk negara yang paling jauh dari bentuk negara ideal yang dicita-citakan oleh Plato (Sukur, 2015: 353).

Visi Ideal Negara Sempurna Plato

Menurut Plato, tidak ada bentuk negara yang sempurna dan abadi. Ia mengamati bahwa kondisi jiwa manusia selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman. Plato tidak setuju dengan sistem pemerintahan demokrasi dan lebih memilih bentuk pemerintahan aristokrasi. Ia berpendapat bahwa pemimpin negara seharusnya dipilih melalui proses keputusan bersama dan bukan melalui pemilihan rakyat.

Dalam memandang politik, Plato melihat bahwa bentuk pemerintahan ideal adalah aristokrasi, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja-filosof yang memiliki kelebihan dan pandangan jauh ke depan (Widagdo, 2015: 55). Namun, ia juga sadar bahwa pemerintahan aristokrasi juga bisa berubah menjadi sistem timokrasi atau bahkan menjadi tirani jika pemimpinnya tidak lagi memperhatikan kepentingan rakyat (Imron, 2014: 233). Oleh karena itu, bagi eksistensi negara yang paling penting adalah bagaimana sistem pemerintahannya diterapkan dengan bijaksana dan berorientasi pada kebajikan bersama untuk memastikan bahwa keadilan dan kebahagiaan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh warga negara.

Tiga Kelas dan Struktur Negara Menurut Pandangan Plato

Menurut Plato, manusia memiliki kebutuhan akan sebuah organisasi sosial dan politik karena merupakan makhluk yang membutuhkan bantuan satu sama lain. Keamanan jiwa dan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sangat

dibutuhkan. Maka dari sebab itu, diperlukan adanya negara yang dapat mengatur semua aktivitas kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Negara harus dipahami sebagai sistem pelayanan yang memerlukan setiap warga negara untuk saling bertanggung jawab, memahami, memberikan dan menerima, menukar jasa, dan memperhatikan kebutuhan sesama. (Sumadi, 2020: 45).

Menariknya juga ialah Plato memiliki pandangan tentang negara ideal. Negara ideal hanyalah perluasan dari konsep manusia ideal. Dalam pandangannya, Plato mempercayai bahwa struktur negara terdiri dari tiga kelas, masing-masing kelas terdiri dari beberapa golongan yang memiliki fungsi dan tugas tersendiri. Keberadaan ketiga kelas ini dianggap sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama. (Sudrajat, 2019: 67).

Pandangan Plato menjelaskan bahwa tiap kelas memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda, namun semuanya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Tiap kelas memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, namun saling melengkapi satu sama lain dalam membentuk sebuah negara yang ideal. (Wiranto, 2018: 89).

Pertama, terdapat kelas manusia yang lebih memprioritaskan kepuasan nafsu dan kebutuhan jasmaninya. Kelas ini dikenal sebagai kelas pekerja atau artisans yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan material dan fisik negara. Mereka melakukan pekerjaan seperti pertanian, perniagaan, perdagangan, dan mekanika untuk memenuhi kebutuhan negara atau masyarakat (Espindola, 2017: 236). Menurut Plato, kelas ini dicirikan sebagai pembuat atau penyinta uang (*money makers or lovers*), karena mereka memuaskan keinginan dan kebahagiaan hidup mereka dengan mengejar uang (Plato, 1998: 328). Meskipun terbatas, mereka memiliki keluarga dan hak kepemilikan pribadi.

Kedua, terdapat kelas manusia yang lebih memprioritaskan kehormatan dan penghargaan. Kelas ini dikenal sebagai kelas tentara atau Guardians yang bertugas sebagai pelindung, penjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan negara (Espindola, 2017: 238). Orientasi hidup mereka didedikasikan untuk kepentingan umum, sehingga mereka tidak memiliki kehidupan pribadi. Anak-anak mereka ditanggung oleh negara dan dididik di tempat-tempat pendidikan bersama, serta dijodohkan berdasarkan warisan watak (Cohen, 2001: 22). Laki-laki dapat menjadi

ayah pada usia 30 sampai 50 tahun, sedangkan perempuan dapat menjadi ibu pada usia 20 sampai 40 tahun. Kejayaan dan penghormatan merupakan satu-satunya hal yang membuat mereka bahagia dalam melayani dan melindungi negara.

Menurut pandangan Plato, hakikat manusia dalam negara ditemukan pada kelas orang-orang yang berkomitmen untuk menjalankan pengolahan intelek dan mencari kebenaran (Plato, 1998: 327). Mereka bertindak sebagai pemimpin dalam negara yang bertanggung jawab untuk mengatur kehidupan masyarakat. Kelas ini dikenal sebagai *Philosopher King* (Sharples, 1994, 52). Kehidupan mereka sepenuhnya terdedikasi untuk memikirkan kebaikan dan kedamaian bagi masyarakat atau negara (Plato, 1998: 329).

Kelas intelegensi terdiri dari para pegawai terdidik yang dipilih dari kelas warga negara tentara berdasarkan kemampuan intelektual mereka. Warga negara tentara memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas sebagai penguasa setelah usia mereka mencapai 50 tahun. Sebelum menjadi penguasa, mereka harus melalui dua puluh tahun pendidikan dan pelatihan filsafat dan tugas praktis dalam kehidupan. Baik selama masa pendidikan maupun setelah menjadi penguasa, mereka harus melakukan disiplin fisik dan intelektual, tidak memiliki hak milik pribadi, harus tinggal di tenda, dan kehidupannya harus ditopang oleh negara tanpa kemewahan (Cohen, 2001: 23). Keberadaan mereka berbeda dari para penguasa politik pada umumnya, karena tugas utama mereka adalah mengupayakan kebaikan umum bagi masyarakat (Roswanto, 2015: 128).

Pembagian Peran Dalam Masyarakat Dalam Filsafat Sosial-Politik Plato

Plato mengungkapkan bahwa, setiap orang tanpa terkecuali baik laki-laki atau perempuan harus diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dan memimpin negara. Ia mengajak untuk mengadopsi nilai persamaan kesempatan tanpa terpengaruh oleh jenis kelamin seseorang. Dalam hal ini, Plato menyarankan agar pendidikan dan pembinaan anak-anak dalam masyarakat dilakukan oleh negara. Pendidikan yang diberikan harus meliputi latihan fisik dan pengajaran ilmu seperti musik, matematika, dan disiplin ilmu lainnya.

Selain itu, Plato juga menekankan pentingnya mempelajari filsafat sebagai dasar untuk menelaah dan memahami doktrin metafisika dan bentuk ideal bagi negara. (Imron, 2014: 233).

Plato menggambarkan, tiga kelas sosial yang ada dalam negara, yaitu the artisans, the guardians, dan the rulers, memiliki tugas masing-masing dan tidak saling merangkap pekerjaan. Kelas pertama memiliki tugas menjalankan kegiatan ekonomi dan memperoleh perlindungan dari the guardians. Sementara the guardians memiliki tugas memantau dan menjaga keserasian pertukaran ekonomi, serta memahami tugas masing-masing dengan bantuan pengetahuan yang diterima dari penguasa bijaksana.

Penguasa Dalam Prespektif Plato

Penguasa yang ideal menurut Plato adalah filosof, sebab mereka memiliki pengetahuan filsafat yang tinggi, yang menjadi pondasi bagi mereka dalam memimpin negara. Sebelum ada filosof yang menjadi raja atau raja yang memiliki semangat dan pengetahuan filsafat, maka masyarakat atau negara tidak akan pernah bebas dari kekacauan sosial dan rasialisme manusia.

Pandangan Plato mengenai negara ideal adalah interrelasi antar tiga kelas sosial yang berbeda-beda, yang masing-masing memiliki tugas dan ciri tersendiri, namun mampu berjalan harmonis karena dikendalikan oleh negara yang dipimpin oleh filosof yang paling ideal. (Sumber: Trabattoni, 2016: 275).

Kesimpulan

Untuk mewujudkan negara yang ideal, pendidikan memegang peran kunci. Setiap anak dan warga negara harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang jenis kelamin. Plato, salah satu filsuf terbesar dari Yunani, percaya bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang baik (Roswanto, 2015: 129). Oleh karena itu, pendidikan berperan sebagai faktor penentu tingkat sosial masyarakat.

Menurut pandangan filsafat sosial-politik Plato, negara ideal adalah sebuah komunitas yang menjunjung tinggi kebajikan dan kebahagiaan bagi seluruh warganya. Negara merupakan sebuah keluarga besar yang menjunjung tinggi persaudaraan, kesetaraan, dan keharmonisan. Setiap kelompok manusia, mulai dari petani, tentara, hingga raja, harus bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan manusia yang tidak bisa terpenuhi secara individual. Posisi dalam sistem pemerintahan ditentukan oleh tingkat pendidikan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki.

Pendidikan juga membantu masyarakat menjadi kritis terhadap sistem pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan pelayanan pendidikan

yang sama tanpa memandang jenis kelamin bagi setiap masyarakat.

Terkahir untuk membentuk negara yang sempurna, harus ada upaya yang dilakukan oleh pemimpin negara. Menurut Plato, pemimpin negara haruslah orang yang bijaksana dan berpengalaman, yaitu seorang filsuf. Negara yang dikehendaki Plato adalah negara yang dipimpin oleh seorang filsuf dengan sistem aristokrasi. Negara seperti ini didirikan atas dasar keadilan, sehingga tujuan utamanya adalah memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Oleh karena itu, pemimpin negara harus mampu memimpin dengan bijaksana dan selalu berpedoman pada asas keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Mohammad. 1999. "Filsafat Plato: Tentang Idea, Hermeneutika, dan Internet". Jurnal Idea Edisi 5, hal. 66-77.
- Bertens, K. 1993. Sejarah Filsafat Yunani. Yogyakarta: Kanisius.
- Cohen, Martin. 2001. Political Philosophy (from Plato to Mao). London: Pluto Press.
- Espindola, Liliana dan Laura Gomez. 2017. "Plato on the Political Role of Poetry". Parnassos Press. Diakses melalui JSTOR.
- Gaarder, Jostein. 1998. Dunia Sophie: Sebuah Novel Filsafat. Bandung: Mizan.
- Hadiwijono, Harun. 1993. Sari Sejarah Filsafat Barat 1. Yogyakarta: Kanisius.
- Hakim, Abdul. 2009. "Negara dalam Perspektif Plato". Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 9, No. 1, hal. 59-74.
- Hatta, Mohammad. 1996. Alam Pikiran Yunani. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Imron, Ali. 2014. "Filsafat Politik Hukum Pidana". Vol. 25, No. 2, hal. 225-259.
- Leny, Andariati. 2020. "Filsafat Plato". Jurnal Review Politik Volume 10, Nomor 01, Juni. ISSN: 2088-6241, e-ISSN: 2615-6504
- Noerhadi, Tuty Heraty. 2013. Aku dalam Budaya: Telaah Metodologi Filsafat. Jakarta: Gramedia.
- Plato. 1998. Republic. Terjemahan oleh Robin Waterfield. Oxford World's Classics.
- Rapar, J.H. 1991. Filsafat Politik Plato. Jakarta: CV. Rajawali.
- Roswanto, Alim. 2015. "Filsafat Sosial-Politik Plato dan Aristoteles". Jurnal Refleksi, Vol. 15, No. 2, hal. 123-138.
- Russell, Bertrand. 1945. History of Western

- Philosophy. Unwin University Books.
- Schmandt, Henry J. 2009. Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sharples, R. W. 1994. "Plato on Democracy and Expertise". Greece & Rome, Vol. 41, No. 1. Diakses melalui JSTOR.
- Sukur, Sylvester G. 2015. Republik Plato. Yogyakarta: Pustaka Prometheus.
- Titus, Harold H. 1984. Persoalan-Persoalan Filsafat. Jakarta: Bulan Bintang.
- Trabattoni, Franco. 2016. Essays on Plato's Epistemology. Leuven University Press. Diakses melalui JSTOR.
- Widagdo, Yudi. 2015. "Hukum Kekuasaan dan Demokrasi Masa Yunani Kuno". Jurnal Diversi, Vol. 1, No. 1, hal. 44-65.
- Yusuf, Burhanuddin. 2018. "Politik dalam Islam: Makna, Tujuan, dan Falsafah (Kajian Atas Konsep Era Klasik)". Jurnal Aqidah-Ta, Vol. IV, No. 1, hal. 1-17.
- Zainuddin, Rahma. 1992. kekuasaan dan Negara, Jakarta: Gramedia.

